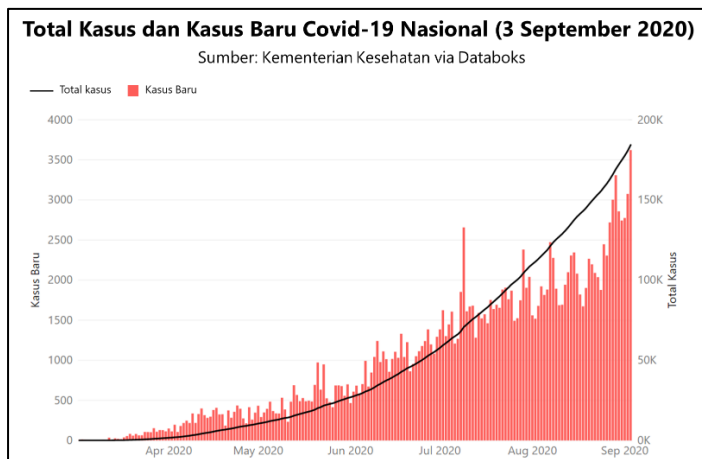


Manakah yang Lebih Penting: Kesehatan atau Ekonomi?

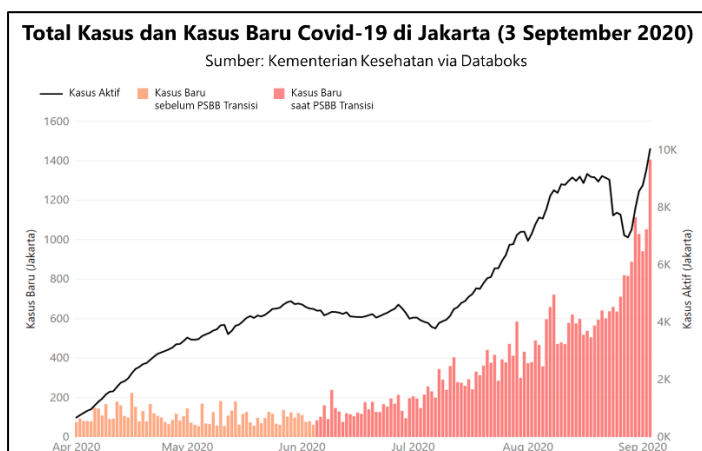
Kurva kasus positif Covid-19 terus melonjak naik sedangkan kurva pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 justru jatuh terjerembab. Keduanya merupakan isu yang memiliki urgensi yang setara, karena sama-sama berkaitan dengan nyawa. Lantas, manakah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah: menurunkan kurva kasus positif COVID-19 atau menaikkan kurva pertumbuhan ekonomi?

Bicara tentang memilih kesehatan atau ekonomi ibarat seorang manusia yang disandingkan dengan dua pilihan: tidak bisa bernafas atau tidak bisa makan, jawabannya tentu tidak dua-duanya karena dengan salah satu diantaranya saja, manusia tersebut tentu tidak akan selamat. Analogi ini nampak cocok bila disandingkan dengan kondisi kesehatan dan ekonomi di Indonesia yang saat ini sedang membutuhkan perhatian khusus.

Kondisi Kesehatan di Indonesia Saat ini



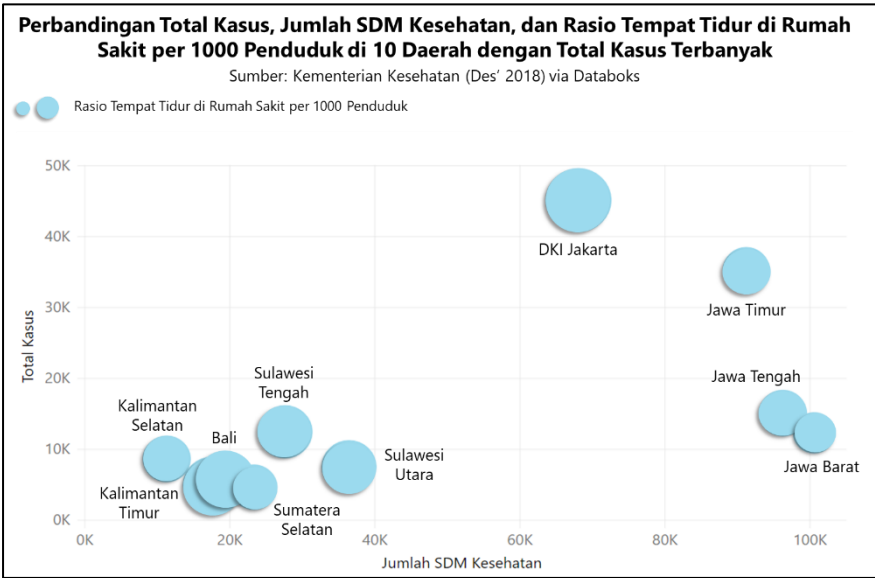
Pada tanggal 3 September 2020, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 3.622 jiwa. Total kasus dan kasus positif baru terlihat masih meningkat secara signifikan terutama pada bulan Juli dan September 2020.



Di Jakarta, secara garis besar kurva kasus aktif masih meningkat secara signifikan dari tanggal 8 Juli sampai 3 September 2020. Penambahan kasus baru pun tidak mengalami penurunan dan justru mengalami peningkatan semenjak PSBB transisi diberlakukan pada tanggal 5 Juni 2020.

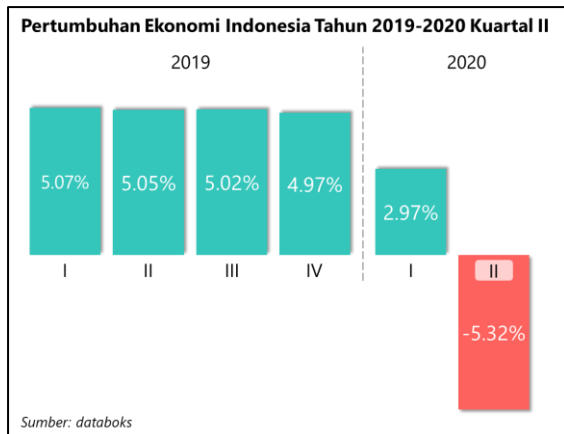


Mengacu kepada data dari Kementerian Kesehatan yang diambil oleh penulis melalui *website* databoks, 10 daerah dengan total kasus positif Covid-19 terbesar per tanggal 9 September 2020 secara berurutan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. DKI Jakarta dan Jawa Timur memiliki total kasus sebanyak lebih dari dua kali lipat jumlah kasus di 8 daerah lainnya.

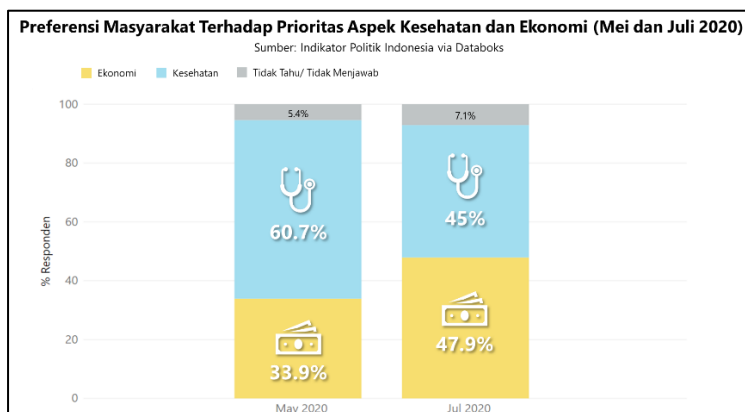


Dengan membandingkan total kasus, jumlah SDM kesehatan, dan rasio tempat tidur di rumah sakit per 1.000 penduduk, dapat dilihat bahwa dari 10 provinsi dengan total kasus positif Covid-19 terbanyak, DKI Jakarta dan Jawa Timur tergolong sebagai 2 provinsi yang masih memiliki kekurangan. Dari aspek jumlah tempat tidur di rumah sakit, Jawa Timur masih mengalami kekurangan karena sebagai provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi kedua, jumlah tempat tidur pada rumah sakit di Jawa Timur tergolong sangat kurang jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Jika dilihat dari sudut pandang jumlah SDM kesehatan, DKI Jakarta tergolong masih kekurangan SDM kesehatan karena jumlah SDM kesehatan pada DKI Jakarta jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah SDM kesehatan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang notabene memiliki total kasus jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Kondisi Ekonomi di Indonesia Saat ini



Lain hal nya dengan kurva kasus positif Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi alias -5,32% pada kuartal II-2020 dibandingkan dengan kuartal II-2019. Oleh beberapa ekonom, Indonesia dinilai sudah berada pada ambang resesi, namun Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, menegaskan bahwa jika pada kuartal III-2020 tidak terjadi kontraksi, maka Indonesia secara teknis tidak mengalami resesi.



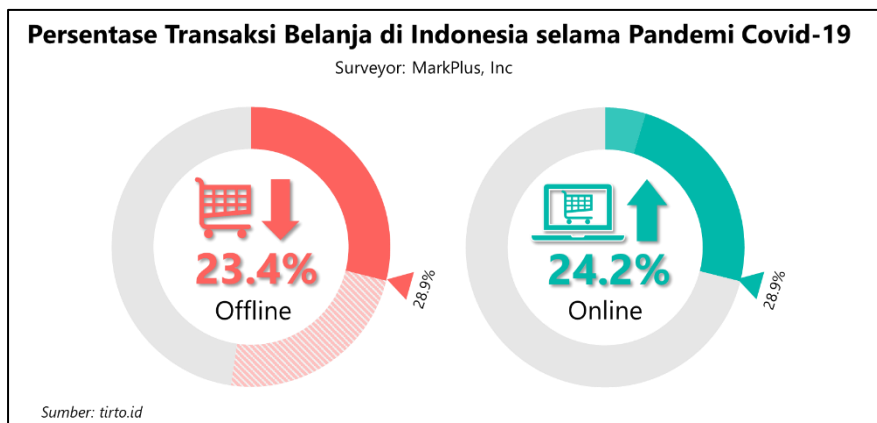
Seiring berjalannya waktu, masyarakat juga nampak lebih memprioritaskan aspek perekonomian dibanding kesehatan. Sebagaimana terpapar pada hasil survey oleh Indikator Politik Indonesia dengan total responden sebanyak 1200 orang dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, prioritas masyarakat mengalami perubahan dari aspek kesehatan pada bulan Mei 2020 menjadi aspek ekonomi pada bulan Juli 2020. Data ini mengimplikasikan bahwa selama dua bulan tersebut, mayoritas masyarakat terkena dampak negatif secara ekonomi sehingga preferensi masyarakat terhadap aspek yang harus diprioritaskan mengalami perubahan. Pemerintah pun nampak sadar akan hal ini dan memiliki tendensi untuk tidak menerapkan kembali PSBB dalam waktu dekat guna memutar kembali roda perekonomian. Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), mengatakan bahwa PSBB akan mengganggu kegiatan perekonomian, sebagaimana tertulis pada artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia pada tanggal 3 September 2020.

Dari kondisi kesehatan dan ekonomi di Indonesia saat ini, timbullah perdebatan di mana apabila *new normal* diterapkan, maka ekonomi akan pulih, namun konsekuensinya jumlah kasus positif akan melonjak naik dan menyebabkan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan terancam tumbang, namun, apabila *new normal* tidak diterapkan, maka Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi. Memilih yang satu berarti mengorbankan yang lain, seperti itulah gambaran dari kondisi kesehatan dan ekonomi di Indonesia saat ini.

Pandangan Berbeda mengenai Aspek Kesehatan dan Ekonomi pada Masa Pandemi

Akan tetapi, pandangan yang berbeda justru datang dari Austan Goolsbee, mantan ketua dewan penasihat ekonomi di Amerika Serikat selama pemerintahan Obama yang juga merupakan ahli ekonom dan pemangku jabatan di *Economic Advisory Panel* untuk *US Federal Reserve Bank of New York*. Sebagaimana dilansir dari artikel yang dipublikasikan oleh McKinsey pada tanggal 19 Juli 2020, Austan menyatakan bahwa negara seharusnya tidak melihat kesehatan dan ekonomi sebagai dua aspek yang saling mengorbankan satu sama lain. Menurut analisa, penurunan 60% dari aktivitas konsumen di Amerika Serikat disebabkan oleh keputusan masing-masing individu untuk tinggal di dalam rumah. Oleh karena itu, Beliau menyimpulkan bahwa dengan memperlambat penyebaran virus, pemerintah akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk kembali berbelanja secara normal dan hal ini merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Beliau juga menegaskan bahwa negara-negara yang lebih memprioritaskan kesehatan cenderung memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik pula. Pandangan yang sama juga datang dari sekretaris jenderal The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagaimana dikutip dari artikel berjudul “*A top economist shares 3 ways leaders can help economies recover*” yang diterbitkan oleh The World Economic Forum pada tanggal 27 Agustus 2020. Beliau mengatakan bahwa pengendalian dan penanganan virus adalah hal yang sangat krusial karena jika hal tersebut diabaikan maka kerugian secara ekonomi yang dialami oleh negara akan semakin besar.

Nyatanya, hasil survey yang dikemukakan oleh Austan Goolsbee juga selaras dengan hasil survey yang diadakan oleh MarkPlus Inc. sebagaimana dipublikasikan dalam bentuk artikel oleh tirto.id pada tanggal 9 Juni 2020.



Data survey menunjukkan bahwa selama masa pandemi, transaksi belanja secara *offline* di Indonesia turun drastis yakni sebanyak 23.4%, sedangkan transaksi belanja secara *online* meningkat tajam yakni sebanyak 24.2%. Kedua angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara *online* dibanding *offline*. Data survey juga menekankan bahwa penerapan protokol kesehatan pada setiap pertokoan merupakan hal yang paling diharapkan oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya keresahan pada masyarakat jika ingin berbelanja secara *offline*, sehingga pemberian rasa aman dapat menjadi kunci untuk mendongkrak kembali perekonomian.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat tetap fokus pada penanganan virus Covid-19 yang akan serta merta memberi dampak positif terhadap kondisi perekonomian. Perlu diperhatikan bahwa aspek kesehatan dan ekonomi sangat erat kaitannya sehingga tindakan-tindakan seperti perpanjangan penerapan PSBB transisi yang memang pada kenyataannya bisa menaikkan perekonomian, tidak akan sepadan apabila tidak disandingkan dengan penanganan virus Covid-19 dan pengaplikasian protokol kesehatan yang semakin tegas.

Penemuan Vaksin Tidak Berarti Penanganan Virus Telah Selesai

Jika memang satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk menekan kurva kasus positif Covid-19 adalah dengan menunggu sampai ditemukannya vaksin, maka ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah antara lain:



Jumlah Vaksin



Waktu Produksi



Sanggup Membeli



Durasi Imunitas



Imunitas terhadap
Virus Mutasi

1. Jumlah vaksin yang dapat diproduksi dalam suatu waktu
2. Lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin
3. Jumlah masyarakat yang sanggup membeli vaksin
4. Durasi waktu imunitas yang diberikan oleh vaksin
5. Imunitas yang diberikan vaksin terhadap virus yang sudah bermutasi

Penemuan vaksin seharusnya tidak membuat campur tangan pemerintah pada aspek kesehatan menjadi longgar, sebaliknya justru pembenahan secara besar-besaran perlu dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengintegrasikan data rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan terkait untuk membuat segmentasi masyarakat yang harus diprioritaskan untuk penerimaan vaksin dan membuat model prediktif terkait *demand* dan *supply* vaksin.

Peran Pemerintah Pasca Covid-19

Dilansir dari artikel yang dipublikasikan oleh World Economic Forum pada tanggal 19 Mei 2020, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk bangkit kembali pasca-pandemi:

1. Memberikan bantuan bagi golongan masyarakat yang paling terdampak

Bantuan ini dapat direalisasikan melalui 3 cara yaitu:

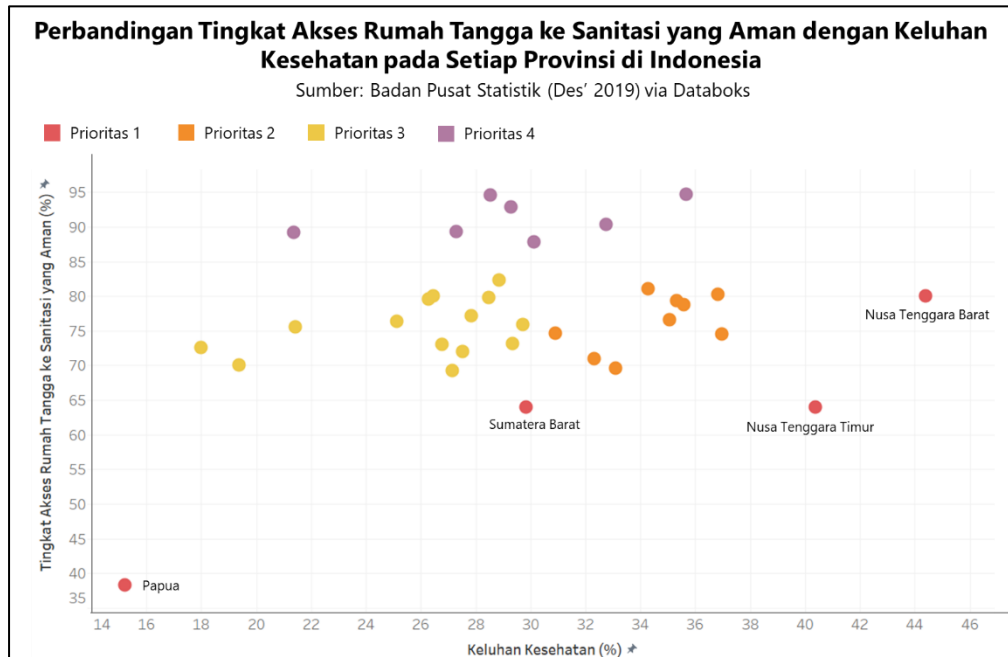
- a. Memberikan bantuan yang memadai dan memiliki cakupan luas bagi golongan yang paling terdampak, contohnya bantuan yang lebih besar untuk masyarakat dengan status ekonomi sosial bawah
- b. Mempertahankan pemberian insentif pada pekerjaan dan menjembatani masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, mendapat perawatan kesehatan, serta mendapatkan akses pelatihan serta pendidikan
- c. Menghindari program perlindungan sosial yang kompleks dan tidak teratur karena program tersebut berpeluang untuk memakan lebih banyak biaya saat direalisasikan dan tidak memberi keuntungan secara adil bagi masyarakat

2. Merencanakan kebijakan-kebijakan baru

Pemerintah dapat merencanakan pemotongan pajak gaji sementara untuk mendorong perusahaan menerima karyawan-karyawan baru. Keringanan pajak juga dilihat dapat memberikan dukungan fiskal secara cepat.

3. Investasi jangka panjang

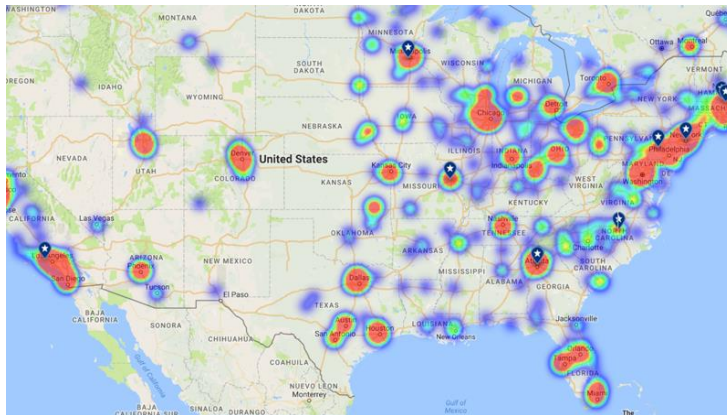
Pemerintah dianjurkan untuk memberikan investasi yang besar terutama terhadap sistem kesehatan, infrastruktur, akses kepada air bersih, pendidikan serta energi terbarukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Efisiensi dari investasi publik adalah hal yang perlu diberi perhatian khusus karena secara umum, sepertiga dari dana untuk pembangunan infrastruktur publik pada suatu negara akan hilang dikarenakan investasi publik yang tidak efisien dan kasus korupsi.



Dari segi aspek sanitasi dan kesehatan, berdasarkan perbandingan persentase tingkat akses rumah tangga ke sanitasi yang aman dengan persentase keluhan kesehatan dan pertimbangan bahwa pelaporan data kesehatan khususnya pada kota-kota kecil belum maksimal, provinsi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 prioritas yakni:

Prioritas 1	Prioritas 2
Papua Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat	Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Jawa Barat Banten Kalimantan Selatan Lampung Jawa Timur Jawa Tengah Gorontalo
Prioritas 3	Prioritas 4
Maluku Utara Maluku Jambi Papua Barat Sumatera Utara Riau Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Aceh Bengkulu	Kep. Riau Kalimantan Timur Bali DKI Jakarta Sulawesi Selatan Kep. Bangka Belitung DI Yogyakarta

Investasi jangka panjang khususnya di bidang kesehatan dan digital juga diperlukan untuk mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi pandemi berikutnya. Salah satu contohnya adalah dengan mengintegrasikan data pada setiap sektor kesehatan termasuk pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan membuat *heatmap dashboard* terkait persebaran penyakit untuk memberikan peringatan dini kepada pemerintah guna mencegah terjadinya wabah.



Contoh dari *heatmap dashboard* (sumber: *geopointe*)

4. Mengatur beban utang pemerintah

Pandemi, krisis ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang diambil telah berkontribusi terhadap peningkatan besar perisial defisit fiskal dan rasio utang pemerintah. Saat ekonomi pulih, rasio utang pemerintah diperkirakan akan stabil meskipun pada tingkat yang lebih tinggi. Jika pemulihan pasca-pandemi membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan, maka dinamika utang bisa menjadi lebih merugikan.

Referensi:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200805191744-532-532606/sri-mulyani-bantah-indonesia-resesi-teknikal>

<https://www.geopointe.com/2016/09/21/creating-cool-looking-maps-geopointe/>

<https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/an-interview-with-austan-goolsbee>

<https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/how-prioritizing-health-could-help-rebuild-economies>

<https://tirto.id/hasil-survei-soal-aktivitas-belanja-warga-saat-pandemi-corona-fGkK>

<https://www.weforum.org/agenda/2020/05/fiscal-policies-for-the-recovery-from-covid-19/>

<https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-leaders-can-help-the-economy-recover-angel-gurria-oecd/>